

DEMOKRASI DAN MULTI KULTURALISME DALAM
KONTESTASI DAKWAH ISLAM.

Rusdin Ahmad

Institut Agama Islam Negeri Palu

Email: mohridwanahmad@gmail.com

Abstract:

The essence of democracy is justice and equality in all aspects of life, including rights as the individual, citizen, and the God's creatures. The plurality of God's creatures is a part of natural law, which is called multiculturalism. Cultural pluralism is not separated from democracy. Democracy is a system of state which is regulated constitutionally and legitimizes all interests and rights of the individuals.

إن جوهر الديمقراطية هو العدل والمساواة في جميع جوانب الحياة، بما فيها حقوق الفرد والمواطنين ومخلوقات الله. أما تعددية مخلوقات الله فهي جزء من القانون الطبيعي، وهو ما يسمى التعددية الثقافية، وهي لا تنفصل عن الديمقراطية. و أما الديمقراطية فهي نظام الدولة التي تنظم دستوريا ويرر جميع مصالح وحقوق الأفراد

Kata Kunci : *demokrasi, multikulturalisme, kontestasi, dakwah Islam*

A. Pendahuluan

Demokrasi dan multikulturalisme dua terma memiliki makna berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, demokrasi menginginkan keadilan, kebersamaan dan persamaan hak serta kewajiban sebagai warga negara, tidak melihat latar belakang, suku budaya dan kelompok serta pemahaman teologi. Sementara multikulturalisme memiliki perspektif keragaman atau plural dalam wacana kebudayaan, adat dan tradisi sebagai wujud *eksistensi* yang harus disiasati secara *epistemologi* atau *medologis* sehingga hubungan demokrasi dan multikulturalisme

menjadi harmonis dalam kehidupan *masyarakat universal*. heterogenitas sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama¹. Pluralitas budaya,-sebagaimana terdapat di Indonesia,- menempatkan demokrasi sebagai sebuah sistem untuk menjembatani mainstrm multikultural sehingga menjadi sangat urgen².Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Tradisi yang terbentuk akan berlainan dari satu suku/daerah dengan suku/daerah yang lain. Pergumulan antar budaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik inilah memerlukan upaya yang berwawasan Multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan³.

Dalam wacana kenegaraan persoalan demokrasi dan multikulturalisme tidak bisa di hindari, sebab keduanya tumbuh dan

¹Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan* (Surabaya: JP Books, 2007), h. 748.

²M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 3.Lihat juga Ainurrofiq Dawam, *"EMOH" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" Menuju Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 22.

³H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grapindo.2004), h. 9-10.

berkembang secara alamiah, sangat keliru jika dalam kelompok masyarakat memaksakan pemahamannya menjadi sebuah sistem yang kakuh dan tidak memberikan peluang secara terbuka berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latarbelakang, maka melahirkan sikap skeptis, represif bahkan cenderung anarkis.

Sementara tuntutan demokrasi dalam tatanan masyarakat multikultural menginginkan keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan HAM. Istilah demokrasi dan multikulturalisme, sebenarnya sudah lama digelendنگkan ditengah-tengah masyarakat modern, namun secara *inklusif* masih memerlukan metode sebagai bentuk penyadaran masyarakat secara komprehensif, sebab di dalam demokrasi dan multikulturalisme selalu diasumsikan sebagai manifestasi kepentingan Barat, seperti diungkap pucurolog, “seiring dengan terpolarisasinya berbagai negara ke dalam jaringan sistem kapitalisme global, muncul sebuah antitesa yang diungkapkan Samuel P. Huntington tentang masa depan pola hubungan internasional yang menunjukkan kecenderungan antagonistik yang diwarnai konflik. Secara tegas mengatakan, konflik itu semakin meningkat antara Islam dan masyarakat-masyarakat Asia di satu pihak dan Barat di pihak lain⁴. Paradigma berpikir inilah harus diberikan pemahaman, bahwa proses demokrasi dalam wacana multikulturalisme, tentu tidak hanya lahir begitu saja meskipun selalu memiliki kepentingan, paling tidak kepentingan yang bersipat universal, yakni mengangkat martabat kemanusiaan, membangun keadilan, menghilangkan kesenjangan sosial dan sebagainya.

⁴Samuel P. Huntington, *Benturan Peradaban*, h. 333 ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam-pandangan-Islam(diakses 22 Oktober 1992), penulis kutip 8 Juni 2011.

B. Demokrasi dan Multikulturalisme

1. Makna Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos* (rakyat) dan *kratein*” (memerintah), semula dalam politik pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang ditentukan orientasinya oleh rakyat sebagai lawan dari sistem pemerintahan yang untuk satu orang (monarki atau kelompok yang di istimewa, sekaligus lawan dari pemerintah tirani dan oligarki, hanya saja dalam perkembangan sistem politik demokrasi selalu mengalami perubahan se-iring dengan perkembangan manusia menuju pencarian kesempurnaan⁵ Sementara dalam pandangan lain bahwa demokrasi berasal dari bahasa latin, *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan, selalu di asosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”⁶ mencermati makna demokrasi, merupakan konsep kenegaraan yang berdasarkan kehendak dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kebersamaan. Meskipun ada sebagian berpendapat bahwa demokrasi adalah proses menuju kesejahteraan masyarakat, secara menyeluruh. Olehnya itu tidak ada pilihan yang harus diciptakan secara serius dari semua kalangan, termasuk membentuk organisasi apapun yang berkomitmen mengembangkan nilai-nilai demokrasi⁷ maknanya bahwa setiap organisasi

⁵Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 154-156

⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta Darul Falah, 1999), h. 228

⁷Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pergolakan Islam Kemanusiaan dan Kebangsaan*, (Yogyakarta, Interpena, 2010), h. 144

formal harusnya mampu memberikan keadilan dan kebebasan dalam berpendapat sebagai konsekuensi dari sebuah demokrasi.

Dikalangan Intelektual Islam memiliki pandangan yang berbeda seperti Al-Maududi mengatakan. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk pemikiran Barat dan bertentangan terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Begitu juga Mohammad Iqbal, Demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun disatu sisi telah mengabaikan keberadaan agama (*eksistensi of religions*), sehingga ia mengusulkan model demokrasi yang berlandaskan Aqidah. Sementara Yusuf al-Qardhawi, bahwa substansi demokrasi sejalan dengan Islam, dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang (rakyat). Kedua, Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani (*otoriter*) juga sejalan dengan Islam. Ketiga, Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi mutlak dilaksanakan dan tidak mengenal golongan putih. Keempat, Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kelima, Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam⁸.

Wacana demokrasi di kaitkan dalam konteks modern tentu memerlukan pemahaman yang mendalam sebab kondisi yang dihadapi saat ini tidak hanya terfokus pada suatu kepentingan, melainkan seluruh aspek kehidupan. Maka pemahaman demokrasi yang terkait dengan pluralitas, sangat memerlukan *evistemologi*, sebagai bentuk berpikir secara adil dan jujur, sehingga keinginan rakyat dan pemimpin saling

⁸<http://www.com> *Demokrasi dalam Islam*, di akses 9Maret 2012

bersinergi, menguntungkan, tidak terjadi diskriminasi, penindasan, pemerasan, perampasan, penggusuran hak-hak masyarakat (*civil society*) akibat pemahaman demokrasi yang bersifat oportunistis, sempit dan keliru.

2. Sejarah Demokrasi

Seperti dijelaskan Ahmad Suhelmi, bahwa istilah demokrasi dalam sejarah sebenarnya tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan kekuasaan dizaman Yunani kuno⁹. Meskipun orientasinya hanya berkisar pada kebijakan interen penguasa. Istilah politik, kekuasaan, dan demokrasi merupakan konsep *evolutive* yang *dinamis*, yang selalu mengalami perubahan dan tidak statis, ini mengisyaratkan bahwa demokrasi selalu berubah, baik bentuk formalnya maupun substansinya hingga sesuai dengan perkembangan zaman.

Istilah demokrasi “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” serta penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat persamaan dimata hukum, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan tujuan menginginkan kedamaian universal. Aristoteles dalam wacana pemikiran politik Yunani kuno tampak jelas mengatakan bahwa rakyat adalah pilar utama sebagai tujuan demokrasi. Benjamin Constant (1819) menjelaskan bangsa Yunani kuno telah menemukan kemerdekaan politik mereka yang ganjil, sipil, publik yang tampaknya hanya tersedia bagi warga negara laki-laki¹⁰ keanehan dari kemerdekaan dalam pandangan ini, telah mendorong Aristoteles menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok sosial dan individu yang dinamakan warga negara (*citizen*)

⁹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat...*, h. 230

¹⁰ Rowe & Schofield *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*, Cambridge University Press (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 11

memiliki hak dan kewajiban yang sama. kelompok sosial minoritas dalam negara (*polis city state*) yang memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan politik Negara kota¹¹ bahwa yang dimaksud adalah memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan penguasa, sehingga hak dan kebebasan mereka selalu memiliki keterkaitan. Meskipun kedaulatan negara demokrasi sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, rakyatlah pemegang supermasi kekuasaan tertinggi.¹²

Perkembangan selanjutnya munculnya istilah demokrasi di Barat ditandai dengan lahirnya modernisme Barat diawali dengan empat faktor yang sangat dominan, pertama runtuhnya otoritas gereja sebagai legitimasi kekuatan *religijs* atas persoalan-persoalan kekuasaan dan politik Roma, kedua, munculnya pemberontakan di beberapa wilayah Eropa seperti Italia, Inggris dan Prancis yang dipelopori oleh "Niccolo Machiavelli (1469-1527), didukung oleh kaum tertindas (*proletar* dari kaum *borjuis*), ketiga lahirnya istilah *renaissance*, serta pengaruh abad pertengahan (476-1492 M), ilmu pengetahuan mulai merambah keseluruh Eropa, meskipun kondisi Barat dalam kegelapan"¹³ keempat, munculnya filsafat modern yang dipelopori oleh Rene Descartes (1596-1650). Seperti dikatakan Bertrand Russell "*History of Western Philosophy*" Priode Sejarah yang lazim disebut modern mempunyai banyak perbedaan

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*, h. 232

¹³ Kegelapan dimaksud adalah masi terjadinya ortodoksi Gereja yang menganggap bahwa segala kehidupan ini ditentukan oleh Gereja sebagai perwakilan Tuhan di bumi, sehingga persoalan keilmuan acuannya adalah kitab suci, ketika Galileo Galilei mengatakan bahwa Dunia ini bulat kemudian mendapatkan hukuman berupa kematian, zaman inilah para intelektual Barat mengatakan terjadi zaman ketidak berdayaan ilmu atau zaman kegelapan.

pandangan priode pertengahan¹⁴ Gerakan renaissance memberi pondasi yang kokoh bagi munculnya abad pencerahan Eropa (XVIII), abad ini merupakan masa dimana gagasan-gagasan demokrasi menjadi perhatian khususnya para pemikir dan disiplin intelektual moral dan politik oleh pemikiran *renaissance* diasosiasikan dengan kekuasaan gereja.¹⁵ termu ini merupakan langka awal terjadinya perubahan, apa yang disebut dengan keadilan dan kebersamaan tanpa ikatan teologi secara kaku, gerakan yang dipelopori oleh Marthin Luther¹⁶ (*the protestanisme*) itulah menjadi tonggak penting dalam perubahan peradaban Barat khususnya di Italia. Repormasi Protestan pada hakikatnya merupakan produk reinterpretasi terhadap doktrin Khatolik ortodoks, serta reaksi terhadap penyimpangan kekuasaan Gereja¹⁷

Disamping juga muncul beberapa tokoh modern lainnya seperti J.J. Rousseau, John Locke (1632-1704) Voltaire, Montesqieu (1689-1755) merereka inilah sebagai perintis lahirnya, demokrasi Barat yang

¹⁴ Pertengahan diperkirakan pada abad 9-15 pada abad ini lazim disebut zaman filsafat skolastik, filsafat abad pertengahan juga disebut sebagai abad kegelapan yang merujuk dalam sejarah gereja, pada era ini agama menjadi objek kajian, disamping juga muncul istilah sekolastik Islam dan skolastik Kristen meskipun dikalangan Kristen belum mengenal filsafat. (Ali Maksum, *Pengantar Filsafat, dari masa Kalsik Hingga Post Modernisme*, (Jogyakarta Ar-Ruzz Media, 2009), h. 97

¹⁵ Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its connection with political and social Circumstances from the Erliest Times to the Present Day* terjamahannya *Sejarah Filsafat Barat* oleh, Sigit Jatmiko, Et,al,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 646

¹⁶ Marthin Luther, Johannes Calvin, Zwing Knox dan sebagainya, merupakan gerakan awal pembaharuan (*renaissance*) dalam agama Kristen, meskipun pada awalnya gerakan ini hanyalah merupakan sebuah protes terhadap para pembesar di Jerman terhadap kekuasaan Imperium Khatolik di Roma (Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakrta Darul Falah, 1999), h. 110

¹⁷ *Ibid*, h.12

dianut dewasa ini”¹⁸ Disamping itu muncul pula faham humanisme, sebagai motivasi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan. Rousseau dan John Locke, merumuskan teori kontrak sosial”¹⁹ sedangkan, Montesquieu merumuskan teori *Trias Politica*, yang dikembangkan pada abad pencerahan merupakan suatu sumbangan besar bagi perkembangan gagasan demokrasi yakni *eksekutif, legis latif dan yudikatif*. Pada perinsipnya teori itu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan negara tidak boleh tersentralisasi pada seorang penguasa yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal atau dikuasai oleh sebuah lembaga politik tertentu saja. Sebab bila demikian akan mudah terjadi penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik rakyat”²⁰ mengingat pentingnya konsep ini sehingga beberapa Negara-negara maju telah menerapkan meskipun masih selalu melakukan inovasi-inovasi paradigma politik dan kekuasaan misalnya Amerika Serikat, Prancis dan beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.

Perkembangan selanjutnya istilah demokrasi mulai mengalami perubahan dan bahkan mengalami pergeseran konsep dan paradigmanya, ”Demokrasi seperti dikatakan di atas bukanlah konsep

¹⁸ *Ibid*, h. 232

¹⁹ Teori kontrak sosial pertama, kedaulatan Negara bukanlah sesuatu yang “*taken for granted*” dan berasal dari Tuhan, pada dasarnya teori kontrak sosial merupakan suatu teori politik yang sepehnya bersifat sekuler, kedua, bahwa dunia dikuasai oleh Hukum yang timbul dari alam (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal(berlaku bagi semua waktu dan golongan, seperti raja, dan rakyat jelata), ketiga, karena kekuasaan dan kedaulatan Negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat, keempat, perlunya kontrak kekuasaan agar penguasa Negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan,(lihat *Ibid*)

²⁰ *Ibid*

yang statis, sementara dalam abad XX terjadi perubahan mendasar mengenai orientasi negara demokrasi²¹ bahkan memiliki kecenderungan menuju demokrasi yang bersifat multikultural dan univesal. Gusdur misalnya menggagas demokrasi yang harus tunduk pada nilai-nilai lokalitas yang dimiliki bangsa²², ini menunjukkan bahwa arah demokrasi tidak lagi mempersoalkan masalah kepentingan sesaat, Gusdur kembali menegaskan, dalam alur demokrasi kehidupan berbangsa memberikan kedudukan yang sama bagi publik menjadi keharusan tanpa ada yang menang sendiri atau dipaksakan tunduk pada rezim tertentu²³ pemahaman tersebut merupakan bagian dari sikap Gusdur dalam memaknai isu-isu demokrasi.

Paradigma demokrasi dalam wacana multikulturalisme merupakan konsep kebinekaan yang senantiasa harus dikembangkan secara terus menerus hingga menemukan kesejatian demokrasi itu sendiri. Hingga akhirnya muncullah istilah-istilah demokrasi kontemporer seperti: kebebasan berpendapat (mimbar Bebas), Hak azasi manusia (HAM), Penegakan Hukum (mahkamah Konstitusi), keadilan konstitusi, Kesetaraan gender, peminisme, pluralisme agama, multikulturalisme, kearifan lokal pencegahan korupsi (KPK) dan sebagainya, meskipun sampai saat ini belum menemukan hakikat dan pormat demokrasi dalam wacana pluralisme dan multi kulturalisme yang damai. Sebenarnya konsep kedamaian merupakan dambaan setiap warga masyarakat,

²¹ *Ibid*,h.235

²² Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa*., h.142

²³ *Ibid*,h.143

meskipun istilah demokrasi seringkali tereduksi dengan kondisi sosiokultural dalam masyarakat plural.

3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Kalau kita mencermati sebenarnya konsep demokrasi tidak bisa berjalan begitu saja dalam suatu tatanan masyarakat yang maju dan berkembang tanpa memiliki prinsip sebagai landasan demokrasi, sebab prinsip merupakan bagian dari sikap dan karakter yang senantiasa dijadikan ukuran misalnya keterbukaan, kebersamaan, sikap saling memahami serta mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Sadek, J. Sulaymân, menjelaskan bahwa dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya:

- Kebebasan berbicara setiap warga negara. Dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berbicara dan berpendapat berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam sistem demokrasi misalnya mengeluarkan pendapat, mengeritik memberikan usulan dan sebagainya.
- Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. Berdasarkan undang-undang pemilihan umum yang harus diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai bukti pelaksanaan demokrasi.
- Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, suara mayoritas dimaksudkan adalah hasil pemilihan umum yang diwakili oleh DPR, sebagai perwakilan Rakyat ditingkat parlemen, namun suara minoritas adalah suara rakyat yang termarginalkan terhadap sistem kehidupan yang tidak berpihak seperti kemiskinan, pengangguran, buruh dan sebagainya.

- Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Partai politik dimaksud adalah partai politik yang bisa memberikan jaminan terhadap keinginan dan menyalurkan aspirasinya, sebagai pemenang pemilihan umum, maupun tidak menang. penyaluran aspirasi lewat partai politik merupakan bentuk demokrasi yang sangat strategis terhadap pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan konstitusi.
- Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk wujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*²⁴.
- Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum). Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh penguasa maupun rakyat, tidak terdapat kesewenang-wenangan yang biasa dilakukan atas nama hukum, karena itu pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan²⁵. Dalam sistem demokrasi tidak ada istilah kebal hukum, semua harus tunduk pada hukum, karenanya dalam supremasi hukum semuanya sama tidak ada perbedaan, hukumlah sebagai penentu.

²⁴ <http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi> Penulis akses /9/April 2012

²⁵ http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi_penulis_aksess/9/April_2012,

- Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Kemerdekaan warga negara merupakan dambaan setiap orang, namun perlu difahami bahwa individu yang bebas tidak terikat dari belenggu, berbeda dengan kebebasan dan belenggu pada hewan atau makhluk lain, namun kebebasan dan belenggu adalah tidak adanya intimidasi, penindasan dan kekerasan namun berada dalam koridor hukum dan aturan-aturan yang telah disepakati secara demokrasi”²⁶.

Dari sekian perinsip demokrasi semuanya mengarah kepada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara yang diatur dalam sistem demokrasi yang berlaku secara universal. Dengan demikian akan tumbuhlah kesadaran masyarakat bahwa kebersaan dan keterbukaan akan menjadi aikon penting dalam era multikulturalisme.

4. Makna Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya”²⁷. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam

²⁶ Uraian tentang prinsip-prinsip demokrasi di atas penulis kutip dari konsep “*trias politica Montesqui*” disamping juga berdasarakan bacaan dari beberapa literatur, seperti *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pemikiran dan sikap Politik Gusdur, Jejak Langka Sang Guru Bangsa, dan Merebut Perbedaan membangun kebersamaan*. Banyak lagi yang lain memiliki signifikansi.

²⁷ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” *Makalah*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h.

kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan²⁸. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut²⁹.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan³⁰. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan lainnya di dalam masyarakat.

Negara atau bangsa yang berada pada konsep pemahaman semacam itu akan semakin maju dan sejahtera dan semakin berkembang. Perspektif ini sebenarnya telah terjadi di zaman Nabi Sulaiman” ketika

²⁸ Watson (2000) dalam Suparlan (2002) atau M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 3. Lihat juga Ainurrofiq Dawam, *“EMOH” Sekolah: Menolak “Komersialisasi Pendidikan” dan “Kanibalisme Intelektual” Menuju Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 22.

²⁹ Suparlan, *menuju masyarakat 2002*

³⁰ Fay (1996) dalam dalam Suparlan (2002), h. 3.

berkomunikasi dengan seluruh Makhluk, termasuk bangsa semut³¹ kemudian dizaman Rasulullah Saw, ketika di Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan budaya bahkan keyakinan namun nabi berhasil menyatukan hingga menjadi sebuah kekuatan yang penuh dengan kedamian. Sebenarnya konsep demokrasi dan pluralisme tidak bisa dihindari sebab keduanya telah berjalan secara *sunnatullah*. Dalam kaitan inilah kita harus menyadari perlunya membangun paradigma ingklusifisme³². Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikultural masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya³³. Multikultural berasal dari kata

³¹Bangsa Semut (*QS.An-Namal* 27:18) Dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman lewat lalu bangsa semut memberikan perintah kepada masyarakatnya, supaya berlindung didalam lubang-lubang mereka kemudian Nabi Sulaiman mendengarkan dan mengehentikan langkah pasukanya lalu mempersilahkan bangsa semut hingga tidak ada satupun yang terinjak, disamping itu Nabi sulaiamn juga memerintakhakan kepada seluruh makhluk supaya menegakakan kebenaran dan keadilan tanpa pandangan bulu dan latar belakang, terlihat ketika seorang ibu menangis supaya diberikan kedilan terhadap seorang bayi kecil, bahwa siapa ibu yang sebenarnya memiliki bayi itu.

³²Inklusifisme, adalah sebuah konsep yang muncul dizaman modern sebagai akibat dari sikap eksklusifisme atau faham ketertutupan, dalam pandangan Alwi Shihab, bahwa sikap Inklusifisme merupakan sebuah sikap keterbukaan yang menerima semua pandangan, bukan berarti menyakini semua atau mengimani semua agama, bahwa dalam masing-masing agama ada nilai-nilai ilahi yang harus difahami oleh pemeluknya sendiri. (Lihat, Alwi Shihab *Islam dan Inklusifisme* dan lihat juga, Hamka Haq *Damai Ajaran semua Agama* Makassar Al-Ahkam, 2004), 198

³³ Lihat Ibid, Jika ditelaah Lebih jauh bahwa, banyak budaya (multi budaya) hidup di daerah-daerah perbatasan antar Negara, antar-suku bangsa, antar-etnik, antar-ras, dan antar-geografis. Di sinilah muncul situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Kita menggunakan istilah *methaphors* untuk menggambarkan kebudayaan campuran (*mixed culture*). Ada beberapa istilah yang menggunakan *methapor* yaitu: *Pertama*, *melting pot* adalah masyarakat masih memelihara keunikan

multi (plural) dan kultural (budaya) yang artinya banyak budaya atau keragaman budaya. Multikulturalisme adalah pemahaman dan cara pandang yang menekankan interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara. Menurut Lawrence Blum³⁴. Keanekaragaman karakteristik spesifik ini mengarah pada suatu muara yaitu bercampurnya berbagai karakteristik. Bervariasinya karakteristik tersebut sebenarnya sebagai media aliran berkembangnya kebudayaan yang akan dibangun. Berbeda dengan *melting pot*, pada *tributaries* keberbedaan antar suku tetap dipandang memiliki arti yang berbeda. Dengan demikian, setiap keberbedaan itu tetap dipertahankan meskipun berada pada tujuan yang sama untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya masing-masing. multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan

budaya untuk membedakan keturunan mereka dengan orang lain. Dalam konsep ini masing-masing etnis dengan budayanya menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan perbedaan tersebut mereka dapat membina hidupbersama dengan baik dan sehat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa *melting pot* terdapat kekuatan untuk mensintesis kebudayaan dari masing-masing kelompok. *Kedua, tributaries* yaitu menggambarkan aliran sungai yang airnya merupakan campuran dari air dari sungai-sungai kecil lain. Aliran sungai itu menuju kearah yang sama, ke sebuah muara. Hal ini menggambarkan bahwa sungai itu merupakan lintasan dari sejumlah budaya yang terus mengalir. *Ketiga, tapestry* adalah bagaikan dekorasi pakaian yang terbentuk dari sehelai benang. Konsep ini diambil untuk menggambarkan kebudayaan Amerika yang dekoratif. Analog yang dapat disampaikan antara lain kain yang terdiri dari satu warna kurang memberikan hasrat bagi pemakainya. Dengan demikian, kain yang multiwarna sebagai perpaduan dekoratif akan memperkaya seni dekorasi tersebut. *Keempat, garden salad/salad bowl* adalah kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad.

³⁴ Lawrence Blum dan Dwicipta, dalam Andre Ata Ujan Ph.D., *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan* (Jakarta: PT. INDEKS, 2011), h. 14.

keingintahuan tentang budaya etnis lain, sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan erbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan³⁵. Pada konsep ini yang ada masing-masing kelompok etnis memperjuangkan keberhasilan kelompoknya sendiri. Dapat saja masing-masing kelompok etnis hidup berdampingan tetapi tidak peduli satu dengan yang lainnya. Masing-masing masyarakat mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya. Olehnya, *Garden Salad/Salad Bowl* tidak memperdulikan adanya komitmen untuk mengetahui dan saling berbagi antar unsure-unsur kebudayaan yang dimiliki kelompok lain.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996; Jary dan Jary 1991; Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Reed 1997). Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai

³⁵ Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.

kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: 'kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.

5. Sejarah Multikulturalisme

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk, terjadi diberbagai belahan dunia seperti : Amerika, Kanada, Australia, India termasuk Indonesia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme melalui berbagai metode termasuk pendidikan. Ini dikarenakan adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyangnya.

Dalam sejarahnya, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal dari Eropa³⁶. Istilah "multibudaya" (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil

³⁶ Reed, I. (peny.) *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin. 1997, hln.

sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot*, yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California³⁷. Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya³⁸.

Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, Teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional.

Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori *Cultural Pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka³⁹. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.

³⁷ 6 James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), h 164.

³⁸ Will, Kymlicka, "Mitsunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h 24.

³⁹ Jary, D. dan J. Jary 1991 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. H.319.

Dengan berbagai teori di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan⁴⁰. Kelompok Amerika hitam, atau imigran Amerika latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya⁴¹. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit⁴².

Multikulturalisme pada akhirnya sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Di Indonesia misalnya persolan multikulturalisme masih

⁴⁰ Nieto, S. Longman *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: 1992. (peny.) *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin 1997

⁴¹ Jary, D. dan J. Jary 1991 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper. H.319.

⁴² Suparlan, P. 1999 'Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme', *Jurnal Studi Amerika* 5:35-42. 'The Concept of Multicultural Society', *Occasional Paper in Ethnic Relations* No.3. Centre for Research in Ethnic Relations (CRER) 1985

dianggap rendah meskipun sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalah artikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak “masyarakat” (plural society) sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia itu sendiri⁴³.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang majemuk adalah munculnya istilah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Model multikulturalisme ini, sebenarnya telah digunakan sebagai acuan para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”⁴⁴. Kebudayaan daerah yang

⁴³ Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan 2001a? Makalah disampaikan dalam Seminar ‘Menuju Indonesia Baru’. Perhimpunan Indonesia Baru – Asosiasi Antropologi Indonesia. Yogyakarta, 16 Agustus 2001. 2001b ‘Indonesia Baru dalam Perspektif Multikulturalisme’, *Harian Media Indonesia* 10 Desember. 2002a ‘Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komunitas dalam Masyarakat Majemuk Indonesia’, *Antropologi Indonesia* 25(66):1–12. Penulis akses tanggal 3 Maret 2017

⁴⁴ Tulisan ini merupakan *Keynote Address* yang disajikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: ‘Membangun Kembali

dimaksud adalah kebudayaan dari berbagai suku, adat-istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke seperti; Suku Jawa, Suku Madura, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Bugis, Suku Makassar dan sebagainya. Semua itu mempunyai keunggulan dan tradisi yang berbeda. Begitu kayanya bangsa kita sehingga menjadi sebuah kekuatan bangsa yang terintegrasi kedalam negara kesatuan Republik Indonesia.

C. Titik Temu Antara Multikulturalisme dan Demokrasi

Dengan demikian, multi kulturalisme dan demokrasi memiliki titik temu yang saling bersinergi, sebagai anugrah dari Tuhan. Di samping itu multikultural sebagai bingkai dalam memahami berbagai bentuk pemikiran, pandangan, meskipun sering dijadikan konflik politik pada tataran individu atau kelompok⁴⁵. Menurut Gusdur bahwa, jaminan dasar akan keselamatan budaya masing-masing atas sikap saling hormat-menghormati, yang mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa dan saling pengertian⁴⁶. Sementara dalam demokrasi, saling pengertian merupakan hal yang mutlak dilaksanakan setiap warga negara, seperti harus mengerti hak-hak orang lain, keinginan dan tujuan setiap individu.

"Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural', Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002. www/http. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Diakses tanggal 2 Maret 2017 atau Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku bangsa atau Kebudayaan? Makalah disampaikan dalam Seminar 'Menuju Indonesia Baru'. Perhimpunan Indonesia Baru – Asosiasi Antropologi Indonesia. Yogyakarta, 16 Agustus 2001.

⁴⁵ Robbert N Bellah dan Phillip E. Hammond, *Beragama Bentuk Agama Sivil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial*, Tth, 212.

⁴⁶ Budhi Munawar Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina), h. 546

Meskipun dalam memenuhi keinginan tersebut tidak semuanya bisa terakomodir dengan baik.

Dengan demikian penulis menguraikan beberapa titik temu antara demokrasi dan multikulturalisme, Antara lain: Pertama, tentang nilai keadilan. Keadilan, dalam istilah bahasa bahwa keadilan adalah “sama berat, atau tidak berat sebelah, tidak memihak, atau berpihak kepada yang benar, berpegang kepada yang benar”⁴⁷, dalam demokrasi maupun multikulturalisme istilah keadilan harus ditegakkan, sehingga tidak ada yang dirugikan sebab itu adalah hak bagi setiap individu, meskipun mendapatkan berbagai tantangan, namun itulah sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan sebagai konsep atau paham kemajemukan (*multikultur*)⁴⁸.

Kedua, tentang nilai kejujuran, adalah sifat yang melekat pada diri manusia, sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk mengamalkan. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kaya akan khazanah sosial, kebudayaan menyimpan potensi⁴⁹ termasuk nilai-nilai kejujuran harus dipelihara dan dijaga sebab didalamnya mengandung fitrah, yang melekat dalam setiap budaya bangsa. Persoalan yang muncul dalam masyarakat terkait dengan sikap ketidakjujuran sehingga melahirkan arogansi dan bahkan merasa benar sendiri, pada akhirnya memicu permusuhan. Kejujuran merupakan sifat fitrah manusia harus dilaksanakan, misalnya jujur mengakui bahwa orang lain memiliki tradisi

⁴⁷ Dep Dik Nas Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, Gramedia Jakarta 2008, hl 10

⁴⁸ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001), h.11-12.

⁴⁹ Greg Fealy, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 204

sebagai budaya yang dianut, kemudian jujur mengakui bahwa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda, hal itu tidak mungkin dipaksakan dan setrusnya. Eksistensi negara demokrasi sebenarnya menghendaki adanya sikap kebebasan, terbuka yang terbingkai dengan nilai-nilai pluralitas, dimana di dalamnya memiliki beragam keinginan dan kepentingan yang saling memberikan kesempatan dalam arti memiliki komitmen kepercayaan dan kejujuran serta moral yang tinggi yang berdasarkan dengan nilai-nilai religius dan normatifitas yang tinggi. Dengan demikian akan lebih memudahkan masyarakat untuk memahami eksistensinya dihadapan Tuhan, bahkan dihadapan pemimpinya, sebab di dalamnya ada saling pengertian dan keterbukaan bahwa kehidupan ini ada hak orang lain yang perlu direspon secara konstruktif.

Ketiga, tentang nilai kemanusiaan (humanisme) dalam kamus filsafat humanisme diartikan, sebagai individu rasional sebagai nilai paling tinggi, individu sebagai sumber nilai terakhir, yang mengabdikan, kreatif dan memiliki moral yang bersumber dari adikodrati⁵⁰. Oleh karenanya memerlukan sikap dan perilaku yang arif dan bijak bahwa dalam setiap individu ada hak setiap orang sebagai hikmah yang terkandung dan tidak bisa dipaksakan.

Meskipun dibalik ungkapan ini terkandung maksud betapa sulit untuk mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana apapun, sebab semuanya serba beraneka ragam⁵¹. Hal ini dikemukakan oleh Harold Coward, bahwa pluralitas atau multikultural merupakan ciri yang sangat

⁵⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005, hl 295

⁵¹ M.Amin Abdullah, *Falsafah Kalam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994), h.104

empirical dalam kehidupan dunia⁴¹ dengan demikian lahirlah berbagai solusi sebagai manifestasi kesadaran misalnya dialog kemanusiaan, dialog keadilan dan bahkan keagamaan. Keanekaragaman (pluralitas) budaya yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh interen umat beragama adalah merupakan kenyataan historis⁵².

Persoalan Demokrasi dan multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh umat manusia dewasa ini⁵³ olehnya itu memerlukan konsep dan pemahaman yang komprehensif terkait dengan demokrasi dan multikulturalisme dalam wacana masyarakat modern dan global. Seperti dijelaskan Zainal Arifin Thoha, Sebenarnya demokrasi yang diinginkan oleh Gusdur adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda bahkan bertentangan sekalipun, baik yang berdasarkan suku, agama keyakinan, kepentingan maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik⁵⁴ yang terbingkai dalam demokrasi.

⁴¹Herald Coward, *Pluralisme Bagi Agama-agama*, (Yogyakarta Kanisius, 1984), 167 Penulis kutip dari “*Merajut Perbedaan Membangaun Kebersamaan...*”

⁵² Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 5

⁵³ Thoha Hamim, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya IAIN Sunan Ampel Press, 2007), h.117

⁵⁴ Zainal Arifin Thoha, Gusdur, NU dan Demokrasi dalam membangun budaya kerakyatan h. 143, penulis Kutip dari “Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*, (Jakarta, Erlangga, 2010),h. 115

Terma Demokrasi dan multikulturalisme merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dihindari, sebab dua konsep ini pasti selalu beriringan sehingga memerlukan epistemologi dalam rangkai pengembangan istilah tersebut ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dimensional plural.

Dengan demokrasi masing-masing komunitas dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta bersikap dewasa dalam berbeda pendapat⁵⁵. Sehingga persepsi dan pandangan terhadap konsep demokrasi yang pluralitas, bukan berarti bertujuan menyamakan paradigma teologi dalam bentuk transendental, melainkan berusaha dan bersikap dewasa dan terbuka (*inklusif*) dalam menerima kenyataan dan kemanusiaan.

D. Demokrasi dan Multikulturalisme Dalam Kontestasi Dakwah Islam.

Kebijakan negara tentang kerukunan memang telah mengidentifikasi dalam tiga kerukunan yaitu kerukunan antar pemeluk agama, kerukunan internal pemeluk agama dan kerukunan antar pemeluk agama dengan pemerintah. Kerukunan internal pemeluk suatu agama, yang dalam penelitian ini adalah sesama umat Islam menjadi menarik dikaji karena berdasarkan berbagai pandangan.

Risakotta mengemukakan bahwa orang-orang yang berbeda agama justru saling memahami perbedaan pandangan di antara mereka. Justru yang seagama sering terjadi perdebatan yang tiada akhir mengenai ”*khilafiyah*” yang terdapat dalam sebuah ajaran agama¹. Dari pandangan

⁵⁵ *Ibid*,h.112

¹ Risakotta, *Memelihara Pemahaman Agama*, (Makassar: UIN Alauddin, 2010), h. 3.

ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus. Misalnya Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor Nahdhatul Ulama yang dengan senang hati menjaga gereja pada hari-hari besar umat Nasrani. Namun, konflik berkepanjangan terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan “tangan politik” Nahdhatul Ulama. Selain itu kelompok Islam diluar NU seperti Front pembela Islam (FPI) sering bersinggungan dengan Banser.

Namun demikian dalam konteks demokrasi dan multikulturalisme umat Islam (termasuk Banser dan FPI) menyadari pula untuk saling mengingatkan bahwa bersikap moderat sangat penting dengan tidak menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dapat memecah belah umat Islam.

Perkembangan organisasi massa Islam di Indonesia berjalan seiring dengan bertumbuhnya organisasi Islam berbasis nasional dan berbasis transnasional. Organisasi tersebut adalah Alkhairāt, Muhammadiyah, NU, Dārul Dakwah wal Irshād (DDI), LDII, Jama’ah Tabligh, HTI, Wahdah Islmiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya. Afiliasi organisasi pada gerakan nasional dan transnasional berkembang seiring dengan terjadinya dinamika sosial masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Perkembangan Islam ini seiring pula dengan perkembangan demokrasi dan multikulturalisme. Dakwah Islam pun senantiasa mengedepankan sikap demokratis dan kesadaran multikulturalisme dalam kehidupan beragama, merbangsa dan bernegara.

E. Penutup

Mencermati makna demokrasi dan multikulturalisme ibarat mata uang dua sisi yang selalu berbawaan, disatu sisi berorientasi pada

keadilan, kesejahteraan dan kebersamaan, sementara disisi lain dituntut suatu sikap toleransi dengan cara menghargai, menghormati dari berbagai latar belakang budaya, yang bernilai kemanusiaan

Eksistensi demokrasi dan multikultural sebenarnya menghendaki adanya sikap kebebasan saling terbuka, pengertian sebagai warga negara. bahwa dirinya adalah bagian dari makhluk Tuhan, yang saling menyangi, mencintai, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketenangan batin, melalui wadah demokrasi.

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999

_____. *Falsafah Kalam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1994

Ahmad, Nur. (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000

Coward, Horald. *Pluralisme Bagi Agama-agama*, Yogyakarta Kanisius, 1984

Digdo, Pringgo. *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta Kanisius, 1990

Fealy, Greg, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal*, Ahmad Suaedy, A. Made Tonny Supriatna, Amiruddin Ar-Rany, dkk. (terj), Yogyakarta: LKIS, 1997

H.M.Nur, Phil. Kholis Setiawan, Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan, Yogyakarta, Dialog Center Prss 2011

Hamim, Thoha. *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Surabaya IAIN Sunan Ampel Press, 2007

Hasan, Fuad. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ke II Jakarta, Balai Pustaka 1990

<http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/9/4/2012>

<http://sejarah-dan-prinsip-demokrasi/9/4/2012>,

<http://www.com> *Demokrasi dalam Islam*, 9Maret 2012

Imarah, Muhammad. *Islam Dan Pluralitas*, Jakarta: Gema Insani Pers. 1999

Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat, dari masa Kalsik Hingga Post Modernisme*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009

Maskur Musa, Ali. dalam judul *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*, Jakarta, Erlangga, 2010

Munawar Rachman, Budhi. (ed.), *Kontekstualisasi Diktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina

N. Bellah, Robbert. dan Phillip E. Hammond, *Beragama Bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi dan sosial*, Tth.

Risakotta, *Memelihara Pemahaman Agama*, Makassar: UIN Alauddin, 2010.

Rowe & Schofield *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi, (Cambridge University Press)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy and its connection with political and social Circumstances from the Erliest Times to the Present Day* terjamahannya *Sejarah Filsafat Barat* oleh, Sigit Jatmiko, Et,al, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta Darul Falah, 1999

Wasid, *Gusdur Sang Guru Bangsa, Pergolakan Islam Kemanusiaan dan Kebangsaan*, Yogyakarta, Interpena, 2010

Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan* (Surabaya: JP Books,. 2007), hlm. 748.

Ainul Yaqin, M. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 3. Lihat juga Ainurrofiq Dawam, *"EMOH" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" Menuju Pendidikan Multikultural* Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.

Rusdin Ahmad, *Demokrasi dan Multikulturalisme dalam Kontestasi...*

- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.2004.
- Huntington, Samuel P, *Benturan Peradaban*, hlm. 333 ustadzkholid.com/download-jian/download-ebook-ham-dalam-pandangan-Islam (diakses 22 Oktober 1992), penulis kutip 8 Juni 2011.
- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," *Makalah*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002,
- M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta 2002: Pilar Media, 2005), hlm. 3. Lihat juga Ainurrofiq Dawam, "EMOH" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual" Menuju Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003.
- Lawrence Blum dan Dwicipta, dalam Andre Ata Ujan Ph.D., *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta: PT. INDEKS, 2011.
- James Banks, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, Newton: Allyn and Bacon, 1984.
- Will, Kymlicka, "Mitsunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, Albany: State University of New York, 1999.
- Jary, D. dan J. Jary, 'Multiculturalism', *Dictionary of Sociology*. New York: Harper 1991
- Nieto, S. Longman *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York.: 1992. (peny.) *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin 1997
- Arifin Zainal, Thoha, Gusdur, NU dan Demokrasi dalam membangun budaya kerakyatan h. 143, penulis Kutip dari "Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*, Jakarta; Erlangga, 2010.
- Hamka Haq, *Damai Ajaran semua Agama*, Makassar: Al-Ahkam, 2004.